UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Respons Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan DAU Specific Grant: Tinjauan Kualitatif Multi-Level dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal
Michael Gorvb Sumbayak, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

INTISARI. ii
ABSTRACT. iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GRAFIK xi
PENDAHULUAN 1
1.1.Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 11
1.3. Pertanyaan Penelitian 12
1.4. Tujuan Penelitian 12
TINJAUAN PUSTAKA 13
2.1.Desentralisasi Fiskal 14
2.1.1.Teori Desentralisasi Fiskal 14
2.1.2.Desentralisasi fiskal di Negara Lain 16
2.1.3.Desentralisasi fiskal di Indonesia 19
2.2.Dana Alokasi Umum (DAU) dan Specific Grant 20
2.2.1.Filosofi dan Perkembangan DAU 21
2.2.2.Konsep dan Definisi Specific Grant 22
2.3.Transisi Kebijakan DAU menjadi Specific Grant 24
2.3.1. Arah Kebijakan DAU Specific Grant 24
2.3.2. Dampak Awal Kebijakan DAU Specific Grant 25
2.4. Kerangka Penelitian 26
METODE PENELITIAN 28
3.1.Jenis Penelitian 28
3.2.Desain Penelitian 28
3.4.Metode Pemilihan Informan 30
3.5.Metode Pemilihan Lokus Penelitian 32

Respons Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan DAU Specific Grant: Tinjauan Kualitatif Multi-Level dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal
Michael Gorvb Sumbayak, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3.6. Metode Analisis Data 36
3.7. Validitas dan Reliabilitas 37
3.8. Metode Penyajian Data 38
3.9. Batasan Penelitian 39
GAMBARAN LOKUS PENELITIAN 40
4.1. Tingkat Ketergantungan dan Profil Fiskal 40
4.2. Karakter Perencanaan dan Penganggaran di daerah 42
4.3. Tantangan Penganggaran dan pelaksanaan anggaran di daerah 45
ANALISIS DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMDA 49
5.1. Analisis Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pemda Provinsi DKI Jakarta 49
5.2. Analisis Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pemda Kabupaten Badung.57
5.3. Analisis Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pemda Provinsi Banten 64
5.4. Analisis Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pemda Kabupaten Kotawaringin Barat 71
5.5. Analisis Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pemda Kabupaten Deli Serdang 78
5.6. Analisis Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pemda Kota Cimahi 85
5.7. Analisis Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pemda Kabupaten Waropen 92
5.8. Analisis Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang 98
5.9. Analisis Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pemda Kabupaten Nias Selatan 102
PEMAKNAAN DESENTRALISASI FISKAL 114
6.1. Pemaknaan Desentralisasi Fiskal oleh Daerah Provinsi DKI Jakarta: Patuh pada Pusat, Mandiri dalam Prioritas 114
6.2. Mengikuti Skema Pusat, Menjalankan Prioritas Lokal: Pemaknaan Desentralisasi Fiskal di Daerah Kabupaten Badung 116
6.3. Kemandirian Fiskal yang Dibatasi oleh Kewajiban Anggaran di Daerah Provinsi Banten 118
6.4. Desentralisasi Fiskal sebagai ruang gerak bersyarat di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 120

Respons Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan DAU Specific Grant: Tinjauan Kualitatif Multi-Level dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal
Michael Gorvb Sumbayak, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

6.5. Ketergantungan yang Dikelola : Pemaknaan Desentralisasi Fiskal di daerah Kabupaten Deli Serdang 124

6.6. Pemaknaan Desentralisasi Fiskal dalam Batas Ketergantungan Fiskal Menengah di Daerah Kota Cimahi 127

6.7. Pemaknaan Desentralisasi Fiskal dalam Kondisi Ketidakberdayaan Fiskal di Daerah Kabupaten Waropen 129

6.8. Desentralisasi Fiskal Tanpa Otonomi Keputusan di Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang 132

6.9. Desentralisasi Fiskal sebagai Administrasi Dana, Bukan Diskresi, di Daerah Kabupaten Nias Selatan 134

PENUTUP 139

7.1. Kesimpulan 139

7.2. Saran 143

GLOSARIUM 147

DAFTAR PUSTAKA 148

LAMPIRAN-LAMPIRAN 155